



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139

Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918

Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : [info@polsri.ac.id](mailto:info@polsri.ac.id)

**KETETAPAN  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
NOMOR : 3626/PL6.4.2/SK/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
TAHUN 2020-2024**

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka terlaksananya Rencana Strategis Politeknik Negeri Sriwijaya;
  - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud pada butir a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Politeknik Negeri Sriwijaya Tahun 2020-2024;
  - bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor : 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menristekdikti Nomor : 17 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Negeri Sriwijaya;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sriwijaya;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 20742/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan  
PERTAMA** :
- KEDUA** :
- Menetapkan Rencana Strategis Politeknik Negeri Sriwijaya Tahun 2020-2024.
  - Ketetapan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 7 Juli 2020

Direktur,



Dr. Ing. Ahmad Taqwa, MT.  
NIP 196812041997031001

**TEMBUSAN :**

- Para Wakil Direktur;
- Para Ketua Jurusan;
- Para Ka. Pusat dan Ka. Unit.

**RENCANA STRATEGIS**  
**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**  
**2020-2024**

---



**KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**  
**TAHUN 2020**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
<b>1.1 Latar Belakang</b>	
1.1.1 Visi Polsri .....	3
1.1.2 Misi Polsri .....	4
1.1.3 Tujuan Pendidikan Polsri .....	5
1.1.4. Asas, Nilai dan Kebijakan Dasar .....	7
1.2 Landasan Hukum dan Filosofis .....	7
1.3 Sasaran Strategis .....	9
<b>Bab II Kebijakan Pengembangan (KP)</b>	
2.1 KP Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan .....	11
2.2 KP Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat .....	12
2.3 KP bidang Sumber Daya Manusia .....	14
2.4 KP Bidang Tata Kelola .....	15
2.5 KP Bidang Sarana dan Prasarana .....	16
2.6 KP Bidang Keuangan .....	17
<b>Bab III Analisis Kondisi</b>	
<b>3.1 Analisis kondisi Internal (AKI)</b>	
<b>3.1.1 Bidang Pendidikan dan Pembelajaran</b> .....	18
3.1.1.1 Bidang Pendidikan .....	19
3.1.1.2 Mahasiswa .....	20
3.1.1.3 Dosen dan Tenaga kependidikan .....	21
<b>3.1.2 Kemahasiswaan dan Lulusan</b> .....	23
<b>3.1.3 Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</b> .....	23
<b>3.1.4 Sarana dan Prasarana</b> .....	25
<b>3.1.5 Kelembagaan</b> .....	30
<b>3.1.6 Koordinasi dan Tata Kelola</b> .....	31
3.1.6.1 Koordinasi Perencanaan Pembelajaran .....	32
3.1.6.2 Tata Kelola .....	32
<b>3.1.7 Pengendalian dan Evaluasi</b> .....	33
<b>3.2 Analisis kondisi Eksternal (AKE)</b>	
3.2.1 Trend Kondisi Kebutuhan Tenaga Kerja Nasional .....	35
<b>Bab IV Target Kinerja</b>	
<b>4.1 Kebijakan Umum</b> .....	36
<b>4.2 Target Kinerja</b> .....	36
<b>BAB V Penutup</b> .....	39

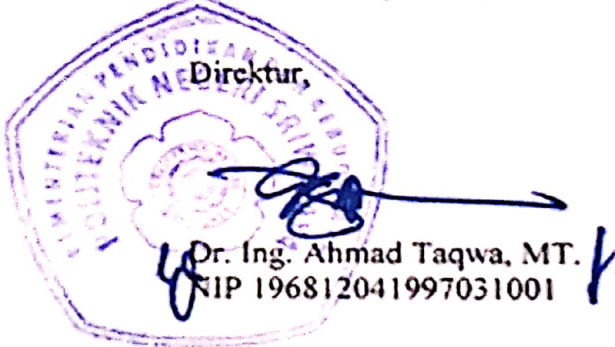
## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan arahan kebijakan Kemdikbud, Politeknik Negeri Sriwijaya secara terus menerus melakukan pengembangan dan perubahan dalam pendekatan perencanaan dan kegiatan operasional yang dilandasi pemahaman pengkajian yang mendalam tentang kondisi internal dan eksternal yang berkembang dewasa ini dengan menganalisa kekuatan, kelemahan, ancaman dan tantangan yang mungkin timbul yang dituangkan didalam Rencana Strategis Politeknik Negeri Sriwijaya tahun 2020-2024 berdasarkan Ketetapan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor: 3626/PL6.4.2/SK/2020 tanggal 7 Juli 2020.

Perkembangan Teknologi dunia industri secara global sangat pesat, sehingga dari rencana strategis Jangka Panjang yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun (tahun 2020-2024) dan merupakan dasar acuan untuk pengembangan Politeknik Negeri Sriwijaya secara global yang dituangkan dalam bentuk program jangka pendek berupa Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan pedoman pelaksanaan program pendidikan tahun tersebut.

Demikian kiranya Rencana Strategis 2020-2024 ini dapat memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan di Politeknik Negeri Sriwijaya.

Ditetapkan di Palembang

Direktur,  
  
Dr. Ing. Ahmad Taqwa, MT.  
NIP 196812041997031001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Peningkatan peran dan kemampuan perguruan tinggi vokasi secara institusi harus terus dilakukan untuk dapat semakin menjamin penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan relevan melalui berbagai program pengembangan yang dilakukan secara terarah, bertahap dan berkelanjutan. Perguruan tinggi vokasi yang berada dalam kawasan pertumbuhan ekonomi yang sedang dikembangkan/ Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api diharapkan dapat berkontribusi dalam menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan membangun kerjasama yang baik dengan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA). Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan Vokasi yang telah lama ada di kota Palembang dan merupakan salah satu dari 6 (enam) Politeknik pertama yang ada di Indonesia, Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) telah berdiri sejak tahun 1982 di atas lahan seluas kurang 7,7 Hektar dimana 70% dari total luas lahan merupakan gedung kampus.

Politeknik Universitas Sriwijaya dibuka pada tanggal 20 September 1982 bersama dengan enam Politeknik negeri pertama di Indonesia. Keenam Perguruan Tinggi Negeri pertama yang mendirikan Politeknik sesuai Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 03/DJ/Kep/1979 adalah Universitas Sumatera Utara, Universitas Sriwijaya, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya. Pada masa itu, politeknik merupakan lembaga pendidikan tinggi jenjang D3 yang berfokus pada pengembangan penguasaan keahlian dan keterampilan pada bidang-bidang teknik tertentu, khususnya teknik mesin dan teknik sipil. Ahli Madya merupakan gelar jenjang lulusan pendidikan politeknik. Posisinya di dalam hirarki manajemen adalah pada tingkat manajemen menengah (*middle management*) yang berfungsi menjembatani kesenjangan manajerial dalam pengelolaan organisasi antara manajemen tingkat atas (*top management*) yang diisi oleh para sarjana lulusan universitas atau institut dan manajemen tingkat bawah (*low management*) yang diisi oleh para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 235/O/1998 tanggal 21 September 1998 tentang Pendirian Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada tahun 1998 Politeknik Universitas Sriwijaya dinyatakan sebagai satuan kerja (Satker) mandiri dengan

nama Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri). Statuta Polsri telah mengalami beberapa pembaharuan dengan Kepmendiknas Nomor 200/O/2002 yang diperbarui dengan Permendikbud Nomor 54 Tahun 2011 dan terakhir saat ini diatur melalui Permenristekdikti Nomor 17 Tahun 2019. Semenjak berdirinya Polsri sebagai Satker juga telah berkembang dalam organisasi dengan diperbaruinya Kepmendiknas Nomor 137/O/2002 menjadi Permendikbud Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sriwijaya.

Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menyatakan Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Polsri merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan Pemerintah. Dalam perkembangannya sejalan dengan tujuan dan sasaran Kemendikbud pada 2020-2024, Polsri saat ini tidak hanya menjalankan program pendidikan jenjang D3 akan tetapi telah memiliki 23 Program Studi yang terdiri 15 bidang rekayasa dan 8 bidang non rekayasa, dengan jenjang pendidikan 11 Program Studi jenjang Diploma Tiga (D3), 11 Program Studi jenjang Sarjana Terapan (D4), serta 1 Program Studi Magister Terapan (S2 Terapan), secara rinci ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Program Studi yang diselenggarakan di Polsri

No.	Program	Program Studi	Status dan Peringkat Akreditasi	Nomor dan Tanggal SK <sup>**</sup>	Tanggal Kadaluarsa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	D-III	Teknik Komputer	B	2433/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2016	20-10-2021
2.	D-III	Akuntansi	B	038/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/II/2015	07-02-2020
3.	D-III	Administrasi Bisnis	A	087/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015	14-03-2020
4.	D-III	Teknik Kimia	B	078/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/II/2015	28-02-2020
5.	D-III	Bahasa Inggris	A	960/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VIII/2015	29-08-2020
6.	D-III	Teknik Telekomunikasi	B	970/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2015	03-09-2020
7.	D-III	Teknik Listrik	B	428/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XI/2014	01-11-2019
8.	D-III	Teknik Sipil	B	450/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XI/2014	14-11-2019
9.	D-III	Teknik Mesin	B	466/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014	14-12-2019
10.	D-III	Teknik Elektronika	B	481/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-	28-12-2019

				III/XII/2014	
11.	D-III	Manajemen Informatika	B	481/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014	28-12-2019
12.	D-IV	Manajemen Informatika	B	846/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/IV/2019	09-04-2024
13.	D-IV	Teknik Mesin Produksi Dan Perawatan	B	2899/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/X/2018	23-10-2023
14.	D-IV	Teknologi Kimia Industri	C	3288/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/XII/2018	12-12-2023
15.	D-IV	Perancangan Jalan Dan Jembatan	B	2163/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/VII/2017	04-07-2022
16.	D-IV	Teknik Energi	B	0618/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/VI/2016	02-06-2021
17.	D-IV	Manajemen Bisnis	C	1611/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/VIII/2016	18-08-2021
18.	D-IV	Akuntansi Sektor Publik	A	2498/SK/BAN-PT/Akred/ST/VII/2019	17-07-2024
19.	D-IV	Teknik Telekomunikasi	B	3314/SK/BAN-PT/Akred/ST/IX/2019	03-09-2024
20.	D-IV	Teknik Elektro	C	482/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-IV/XII/2014	28-12-2019
21.	D-IV	Usaha Perjalanan Wisata	C	482/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-IV/XII/2014	28-12-2019
22.	D-IV	Teknologi Informasi Multimedia Digital	-	-	-
23.	S2	Teknik Energi Terbarukan	C	3293/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2018	12-12-2023

### 1.1.1 Visi Polsri

Polsri merumuskan Visi sebagai berikut:

**“Menjadi Lembaga Pendidikan Vokasi yang Unggul dan Terkemuka.”**

Lembaga pendidikan vokasi yang unggul mengandung makna terhadap capaian mutu yang mampu bersaing dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada keahlian terapan. Sementara yang terkandung pada lembaga pendidikan vokasi yang terkemuka yakni terletak pada pencitraan Polsri yang dapat menjadi rujukan, diminati, dan berprestasi.

Adapun yang menjadi indikator untuk unggul terletak pada:

1. Proses pendidikan dengan tata kelola yang baik dengan menuju akreditasi institusi dan prodi berpredikat A.

2. Sumber daya manusia yang unggul dalam metodologi pembelajaran dan pada implementasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Memiliki sarana dan prasarana yang berstandar mutu dalam menunjang akademik.
4. Lulusan yang dapat meraih pekerjaan pertama kali rerata kurang dari 6 bulan.
5. Tingginya kuantitas luaran publikasi ilmiah yang dimuat pada jurnal-jurnal bereputasi.
6. Meningkatnya kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sementara itu yang menjadi indikator untuk terkemuka terletak pada:

1. Meningkatnya kuantitas kunjungan kerja ke Polsri dan diberinya mandat oleh Kemenristekdikti untuk menjadi politeknik pembina.
2. Peningkatan peminat seleksi calon mahasiswa terhadap daya tampung, yakni dengan rasio pendaftar dan yang diterima adalah 15 : 1.
3. Secara prestasi, pada implementasi bidang penelitian telah berada pada peringkat “klaster madya”, dan pada bidang pengabdian kepada masyarakat telah berada pada status manajemen “sangat bagus”;
4. Peningkatan kerja sama pada bidang pendidikan yang lulusannya langsung menjadi karyawan di beberapa BUMN dan industri, saat ini telah berlangsung yakni dengan PT. Perusahaan Listrik Negara, PT. Garuda Maintenance Facility, PT. Tanjung Enim Lestari dan PT. Bukit Asam Tbk, PT. Trias Indra Saputra Legrand Prancis.

#### 1.1.2 Misi Polsri

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Polsri menjabarkannya kedalam beberapa Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dalam bidang rekayasa dan non rekayasa yang berkualitas dengan berbasis pada sistem penjaminan mutu;
2. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta hasil penelitian terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
3. Mengembangkan organisasi dan meningkatkan mutu pengelolaan sumber daya Polsri untuk mewujudkan kinerja secara efektif, efisiensi, dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemitraan dengan pihak lain yang saling menguntungkan dalam



rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pada misi pertama Polsri, terkandung upaya dalam peningkatan pelaksanaan bidang pendidikan yang mengacu pada standar mutu secara berencana dan berkelanjutan. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilakukan dengan sistem penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi standar mutu, pengendalian standar mutu, dan peningkatan standar mutu. Standar mutu yang dimaksud adalah dengan memenuhi standar pendidikan tinggi yang meliputi standar akademik dan non akademik yang ditentukan oleh Polsri.

Pada misi kedua Polsri, diimplementasikan dengan berbagai bentuk luaran penelitian dan pengabdian yang distandarkan untuk menjadi materi pembelajaran dan dapat dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah pada jurnal yang bereputasi serta dapat pula bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pada misi ketiga Polsri, terkandung makna dalam upaya untuk meningkatkan tata kelola yang mengarah kepada *good governance* melalui penerapan sistem informasi manajemen yang terintegrasi pada semua layanan akademik dan non akademik sehingga Polsri tampil sebagai lembaga yang memiliki daya tarik dan mampu menjawab kebutuhan pemangku kepentingan.

Pada misi keempat Polsri, ditekankan pada upaya Polsri untuk meningkatkan kerja sama dan kemitraan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan pemangku kepentingan (industri, dunia usaha, masyarakat nasional dan internasional) dengan berkomitmen pada kualitas yang dinamis.

### 1.1.3 Tujuan Pendidikan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi diperlukan kejelasan arah tujuan pengembangan, peningkatan kapasitas dan penguatan program serta kegiatan. Tujuan Pendidikan menjadi luaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan di Polsri, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya lulusan yang berkualitas, berdisiplin, bermoral, berjiwa wirausaha, berwawasan lingkungan, dan relevan dengan perkembangan industri.

2. Meningkatnya penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta hasil penelitian terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Meningkatnya mutu manajemen melalui pemberdayaan dan pengembangan organisasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dan mampu menghadapi tantangan masa depan.
4. Meningkatnya mutu dan efisiensi pelayanan dalam bidang penyelenggaraan pendidikan.
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan kemitraan dengan pihak lain yang saling menguntungkan.
6. Meningkatnya kemitraan dengan pihak lain yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

#### 1.1.4 Sasaran

##### 1. Bidang Pendidikan

- Menghasilkan lulusan dengan kualifikasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
- Memperluas kesempatan mendapatkan pendidikan bagi yang mempunyai potensi.
- Memperbanyak pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kompetensi keahlian.
- Menyelenggarakan program pendidikan yang produktif dan aplikatif sesuai kebutuhan pasar kerja.

##### 2. Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM).

- Menyelenggarakan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang produktif dan inovatif dan berdampak pada kesejahteraan

##### 3. Bidang Sumberdaya Manusia

- Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas dalam mendukung tridarma perguruan tinggi.

##### 4. Bidang Organisasi dan Manajemen

- Terwujudnya *good governance* dalam tridarma perguruan tinggi dan pendukungnya

##### 5. Bidang Sarana dan Prasarana

- Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung program tridarma perguruan tinggi dan pendukungnya

##### 6. Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerjasama

- Memperluas peningkatan kerja sama dengan eksternal

#### 7. Pendanaan

- Tersedianya sumber pendanaan yang berkelanjutan
- Memperbesar kemampuan pendanaan dengan cara diversifikasi sumber pendanaan

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) dirumuskan berkaitan dengan penyusunan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2011-2035 melalui ketetapan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor 2175/PL6.4.2/SK/2012 tentang penetapan Rencana Pengembangan Jangka Panjang 2011-2035, dan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 melalui Ketetapan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor 3626/PL6.4.2/SK/2020.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini telah diusahakan menggunakan metode dari unit dan jurusan/prodi (bottom up) melalui rapat kerja (Raker) sehingga aspirasi dari unit dan jurusan/prodi sangat mewarnai kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. Aspirasi dari unit dan jurusan tersebut meliputi hampir seluruh kegiatan. Perencanaan dengan pendekatan seperti ini diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih terarah, berkesinambungan, ekonomis dan tepat guna, mengingat unit dan jurusan adalah pengguna sekaligus perencana yang mengetahui betul sasaran yang diinginkan. Rencana Strategis (Renstra) Polsri 2020-2024 ini dibuat berdasarkan juga atas capaian pada periode sebelumnya. Renstra ini disusun sebagai standar untuk dikembangkan dan dijadikan pedoman Polsri dalam merencanakan kegiatan tahun 2020-2024.

Renstra Polsri 2020-2024, sesuai dan mendukung keberhasilan Visi Kemendikbud 2020-2024 yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

#### 1.1.5 Asas, Tata Nilai dan Kebijakan Dasar

Asas, Tata nilai dan Kebijakan Dasar Polsri yaitu **amanah, disiplin, bertanggung jawab, profesional, visioner dan berkeadilan.**

#### 1.2. Landasan Hukum dan Penyusunan

Landasan hukum penyelenggaraan pendidikan di Polsri yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336).
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007).
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Negeri Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 282);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51).

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555).
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 721).
14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 032/DJ/KEP/1979 tentang Pembentukan Politeknik di 6 (enam) Daerah yang Mempunyai Perguruan Tinggi Negeri.
15. Kebijakan Kemendikbud Tentang Merdeka Belajar: Kampus Merdeka pada tanggal 24 Januari 2020.
16. Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
17. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2024.

### **1.3. Sasaran Strategis**

Polsri sebagai penyelenggara pendidikan tinggi vokasi menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis sebagai penjabaran dari Tridarma perguruan tinggi dan pendukung Tridarma Perguruan Tinggi yang diterapkan pada masing-masing bidang, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dan Mahasiswa Pendidikan Tinggi
2. Memperluas Kesempatan Mendapatkan Pendidikan yang layak
3. Terselenggaranya Pendidikan dan Pengajaran yang Relevan Dengan Iptek dan Pasar Kerja
4. Menyelenggarakan Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Produktif dan Inovatif dan Berdampak pada Kesejahteraan
5. Tersedianya SDM yang Handal dan Berkualitas Dalam Mendukung Tridarma Perguruan Tinggi
6. Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Program Tridarma Perguruan Tinggi dan Pendukungnya
7. Memperluas Peningkatan Kerjasama dengan External.

## BAB II KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, dengan sasaran adalah 1) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi; 2) Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan; dan 3) Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas. Dari sasaran yang dikemukakan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, maka perguruan tinggi harus melakukan transformasi dalam melaksanakan pendidikan tinggi yang relevan dengan dinamika kekinian dari masyarakat dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan kapasitas dan kualitas proses dan pengelolaan pendidikan menjadi fokus perguruan tinggi.

Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi harus merujuk kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 18 Ayat (3) yang telah dioperasionalkan sebagai Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan MBKM menjadi dasar perguruan tinggi dalam menjalankan program dan kegiatan. Ada empat kebijakan penting dalam Kampus Merdeka yaitu



Gambar 1 Kebijakan Kampus Merdeka

Dengan demikian arah kebijakan dan strategi Polsri pada kurun waktu 2020-2024 disesuaikan dengan kebijakan Kemendikbud.

## **2.1 Kebijakan Pengembangan Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan**

Pendidikan di Polsri diarahkan untuk mendorong terciptanya kompetensi yang tinggi bagi para lulusannya melalui pencapaian keunggulan pendidikan vokasi. Keterpaduan kurikulum pendidikan (Program Studi) mulai dari jenjang D III, D IV (Sarjana Terapan), S2 Terapan serta kelas-kelas kerjasama merupakan ciri khas yang perlu dikembangkan di Polsri. S2 terapan dengan program studi Energi Terbarukan akan merupakan ciri khas dalam pengembangan pendidikan kedepan.

Pendidikan di Polsri dirancang untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi di tingkat teknikal maupun manajerial. Peningkatan mutu akan diiringi dengan pengembangan program studi unggulan dan kelas-kelas khusus kerjasama baik dengan Pemerintah maupun dengan industri dalam upaya memenuhi tuntutan kompetensi yang diinginkan. Pengembangan kurikulum program studi diarahkan untuk memenuhi standar baku yang ditetapkan pemerintah dan updating kurikulum yang menyesuaikan kebutuhan dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), sehingga lulusan Polsri memiliki kompetensi yang mampu bersaing secara nasional bahkan internasional.

Perluasan akses pendidikan bagi mahasiswa domestik dan mahasiswa asing menjadi salah satu prioritas pengembangan Polsri. Sejalan dengan kegiatan internasionalisasi, akses pendidikan bagi mahasiswa asing juga sudah mulai dikembangkan. Beberapa mahasiswa asing telah mengikuti proses pembelajaran, mereka berasal dari negara Tajikistan, Sudan, dan Vietnam.

Kegiatan pembelajaran dapat dikembangkan untuk melayani kebutuhan keahlian atau keprofesian tertentu dengan membekali peserta didik agar mencapai kompetensi baik *hard skill* maupun *soft skill*. Polsri menyiapkan pendamping ijazah berupa sertifikat kompetensi bagi lulusan yang dikeluarkan oleh BNSP dikelola oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polsri. Program studi perlu diberdayakan untuk mencapai keunggulan akademik baik melalui pengembangan staf pengajar maupun kerjasama dengan lembaga pemerintah dan industri. Pencapaian keunggulan akademik ini tetap menjadi landasan utama dalam melakukan kerjasama program studi atau pelatihan dengan pihak pihak eksternal Polsri.

## 2.2 Kebijakan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Misi POLSRI tentang Rencana Program dan Kegiatan tetap menjadi acuan di dalam pengembangan strategi bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat:

- a. Melaksanakan pendidikan dan mengembangkan inovasi dalam pendidikan vokasi bidang rekayasa dan non rekayasa dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.
- b. Melaksanakan penelitian bidang rekayasa dan non rekayasa untuk mengembangkan teknologi yang dapat diaplikasikan guna membangun kekuatan perekonomian regional dan nasional.
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan temuan-temuan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam memecahkan masalah-masalah masyarakat.

Peningkatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan diupayakan untuk menumbuhkan budaya riset. Kebijakan budaya riset perlu disertai dengan pengembangan sistem penghargaan yang memadai bagi peneliti Polsri yang menyumbangkan pemikiran dan tenaganya dalam penelitian. Penelitian Polsri dalam upaya untuk mengembangkan teknologi yang dapat diaplikasikan guna membangun kekuatan perekonomian nasional, akan diarahkan kepada riset unggulan dan strategis nasional dilengkapi dengan eksplorasi dan aplikasi yang lebih mendalam bagi pemecahan masalah-masalah daerah, regional dan nasional.

Kelompok peneliti perlu dibentuk untuk melayani kebutuhan *stakeholder* melalui hasil-hasil penelitian. Kerjasama dengan lembaga riset nasional dan internasional perlu digalakkan untuk meningkatkan percepatan dan daya guna inovasi. Pengalokasian dana penelitian yang memadai diperlukan untuk mendukung kegiatan penelitian dari waktu ke waktu.

Pengabdian kepada masyarakat tidak hanya pada tingkat lokal dengan memecahkan masalah-masalah di daerah, tetapi juga diupayakan pada tingkat nasional. Dikotomi antara penelitian murni dan terapan perlu dihilangkan karena keduanya saling bersinergi dan akuntabilitasnya adalah dari nilai tambah yang diberikan baik bagi kalangan industri maupun ilmiah.

Pada tahun 2021, Polsri melalui P3M telah mulai melaksanakan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi dengan mitra dari luar negeri. Beberapa penelitian telah dilakukan dengan melibatkan peneliti dari Politeknik dan atau Universitas luar negeri, seperti dari Malaysia, dan Philipina.



Kebijakan dan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Polsri dan P3M dalam meningkatkan jumlah penelitian, dan hasil penelitian yang berkualitas oleh dosen, dan mahasiswa yaitu:

- a. Melakukan pelatihan ilmiah yang berkala kepada dosen dan mahasiswa;
- b. Melakukan pendampingan dalam proses unggah dokumen proposal;
- c. Melakukan pendampingan yang intensif kepada pengusul tentang penulisan proposal, memberikan trik-trik dalam penulisan;
- d. Pendampingan tentang pengolahan dana sesuai dengan RAB serta PMK;
- e. Adanya pemberitahuan tentang pelaporan dokumen secara langsung kepada tim pelaksana, serta adanya sanksi keterlambatan pengumpulan Laporan Akhir;
- f. Sosialisasi yang secara rutin tentang luaran wajib dan luaran tambahan serta jenis luaran yang harus dipenuhi;
- g. Adanya penangguhan pencairan dana sisa 30% dari total, apabila luaran tidak terpenuhi.

Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Polsri mengacu pada Rencana Strategis PKM 2016-2020, serta Rencana Induk Penelitian (RIP) tahun 2016-2020. Dalam RIP ada 11 prioritas utama program strategis Pengabdian kepada Masyarakat yaitu:

- a. Penerapan Ipteks untuk pengolahan dan pengelolaan sektor energi
- b. Penerapan Ipteks untuk pengolahan dan pengelolaan air dan pangan
- c. Penerapan sistem informasi manajemen, teknologi informasi, dan komputasi pada masyarakat produktif dan non produktif, pada wirausaha dan UMKM, dan pada masyarakat dunia
- d. Penerapan teknologi pada pengolahan dan pengelolaan industri unggulan daerah.
- e. Penerapan teknologi material maju dan teknologi tepat guna pada industri kecil, UMKM, industri pengolahan terkait pertanian, peternakan dan perikanan.
- f. Perbaikan proses & kapasitas produksi, mutu manajemen akuntansi dan pemasaran pada masyarakat wirausaha, UMKM, dan masyarakat produktif.
- g. Perbaikan manajemen produksi, SDM, pengarsipan, promosi, dan pemasaran pada UMKM unggulan daerah, potensi wilayah dan desa.
- h. Penerapan teknologi pengolahan limbah dan pencegahan pencemaran oleh industri.
- i. Ipteks bagi masyarakat untuk bidang sosial dan humaniora meliputi pembelajaran berbahasa Indonesia/asing yang baik dan benar, pembangunan karakter, agama, hukum, civil society dan seni.
- j. Ipteks bagi masyarakat dalam metodologi pembelajaran untuk pendidikan ekstra

- kurikuler dalam mengatasi masalah di wilayahnya.
- k. Penerapan teknologi dan manajemen transportasi dan penanggulangan bencana.

### **2.3 Kebijakan Pengembangan Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)**

Peningkatan SDM pada periode 2020-2024 merupakan kelanjutan dari Renstra Polsri 2016-2020 yaitu program pengembangan dan peningkatan kualitas SDM sesuai dengan bidang kompetensinya. Pengembangan difokuskan pada SDM agar mempunyai :

- a. Keahlian dan keterampilan dalam metodologi pembelajaran untuk mendukung implementasi kurikulum berbasis kompetensi
- b. Staf dosen dan/atau instruktur yang mempunyai sertifikat keahlian pada bidangnya
- c. Kemampuan akademik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta hubungan industri;
- d. Mengembangkan kompetensi dan kemampuan bagi dosen dan tenaga kependidikan melalui bimbingan teknis dan pelatihan
- e. SDM pendukung tridarma perguruan tinggi yang handal dan profesional

Kebijakan peningkatan SDM akan diberlakukan untuk seluruh kegiatan secara proporsional sesuai kebutuhan, yaitu:

- a. Melakukan rekrutmen berdasarkan nisbah dosen dan mahasiswa minimal 1:18 dan maksimal 1:22 untuk rekayasa dan minimal 1:28, dan maksimal 1:32 untuk non rekayasa sampai tahun 2020.
- b. Melakukan rekrutmen dosen dengan syarat kualifikasi pendidikan minimal magister setiap tahun.
- c. Melaksanakan pelatihan metodologi pengajaran setiap tahun.
- d. Memberikan prioritas utama bagi dosen yang belum sertifikasi dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian setiap tahun.
- e. Mensyaratkan dosen yang mengajar pada Magister Terapan minimal pendidikan doktor.
- f. Menentukan beban kerja dosen minimal 12 sks dan maksimal 16 sks bagi dosen tanpa tugas tambahan, dan minimal 3 sks, dan maksimal 16 sks dosen dengan tugas tambahan.
- g. Mewajibkan dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan keahlian melalui pelatihan setiap tahun.
- h. Persentase pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap
- i. Tenaga kependidikan yang berkualifikasi S1 dan S2

j. Rasio tenaga kependidikan terhadap mahasiswa

## 2.4 Kebijakan Pengembangan Bidang Tata Kelola

Suatu organisasi pendidikan tinggi yang menganut prinsip-prinsip *good corporate governence* tercermin dari beberapa ciri yaitu :

- a. Transparansi; yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai organisasi.
- b. Kemandirian; yaitu suatu keadaan dimana organisasi dikelola secara profesional tanpa beturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat.
- c. Akuntabilitas; yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan organisasi terlaksanakan secara efektif.
- d. Pertanggungjawaban; yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan organisasi terhadap peraturan-peraturan dan aturan-aturan lembaga Polsri yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat.
- e. Kewajaran (*Fairness*); yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memnuhi hak-hak stakeholder di dalam organisasi yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan pemerintah yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, Polsri mempunyai organisasi utama yang terdiri dari : Direktur dan Wakil Direktur, Senat Polsri, Jurusan/ Program studi, Bagian dan unit penunjang lainnya. Direktur yang dibantu oleh para Wakil Direktur memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administratif dan edukatif Politeknik. Senat Polsri merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Politeknik. Jurusan / Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. Bagian yang ada saat ini ada dua yaitu 1) Bagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas memberikan layanan di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi Akademik, 2) Bagian Umum adalah unsur pembantu pimpinan di bidang umum, keuangan dan kepegawaian dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Selain dari pada itu terdapat unsur penunjang antara lain Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (PPPM), Badan Penjaminan Mutu (BPM), Pusat Informasi dan Humas (PIH), Pusat Pengembangan Pendidikan dan Aktivitas Instruksional (P3AI), Satuan Pengawasan Internal (SPI), Unit penunjang lainnya adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang merupakan perangkat kelengkapan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian yang terdiri atas: a) UPT Perpustakaan, b) UPT Pemeliharaan dan Perbaikan, c) Unit pelaksana teknis lainnya.

Pengembangan/perbaikan struktur organisasi dan tata kerjanya akan terus dilakukan sesuai kebutuhan dalam menghadapi tantangan masa depan menuju Polsri unggul dan terkemuka.

## **2.5 Kebijakan Pengembangan Bidang Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang berpengaruh besar terhadap efisiensi dan efektifitas proses pembelajaran perlu ditingkatkan. Penggunaan sarana sebaiknya diarahkan untuk peningkatan utilisasi dan efisiensi. Penggunaan ruang sebaiknya didasarkan pada kebutuhan yang tertuang dalam rencana kerja unit yang terkait. Pemeliharaan sarana akan lebih banyak melibatkan unit pelaksana yang menggunakan sarana tersebut.

Pengembangan lembaga diarahkan untuk mencapai misi lembaga yang diemban, berdampak positif kepada peningkatan taraf hidup masyarakat setempat dan mendukung terselenggaranya program pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Evaluasi diri lembaga, program studi dan bagian/unit secara holistik mesti terus dilakukan supaya investasi mempunyai dasar yang kuat dan tepat guna serta tepat sasaran. Evaluasi diri menggunakan analisa SWOT merupakan salah satu dasar strategis investasi prasarana, untuk meningkatkan kapasitas Polsri dalam melayani pendidikan dan penelitian. Dalam hal pengembangan lembaga, Polsri juga perlu mencari peluang baru untuk memperluas lahan Polsri juga perlu untuk mencari peluang baru untuk memperluas lahan yang ada, terutama melalui pendekatan terhadap instansi pemerintah daerah dan pusat untuk mendapatkan lokasi tambahan atau baru untuk kegiatan penelitian dan pendidikan.

Mengingat Polsri sudah berumur lebih dari tiga puluh empat tahun maka perlu dilakukan revitalisasi laboratorium dan bengkel agar peralatan yang sudah tua atau rusak dapat diganti dengan yang baru sehingga kesenjangan pembelajaran laboratorium tidak terlalu jauh berbeda dengan yang ada di industri.

Adapun pengembangan sarana dan prasarana Polsri meliputi pembangunan, pengadaan dan perawatan:

- a. Gedung/bangunan utama dan pendukung
- b. Laboratorium, bengkel, perpustakaan, dan perkantoran.
- c. Sarana dan prasarana pembelajaran
- d. Sarana dan prasarana olah raga dan kesenian
- e. Utilitas (parkir, jalan, masjid, toilet, kantin, air bersih, drainase, resapan air, sarana komunikasi)
- f. Tempat Uji Kompetensi (TUK)

## **2.6 Kebijakan Pengembangan Bidang Keuangan**

Dalam menghadapi tantangan ke depan seperti BLU maka kebijakan sumber dana yang mandiri akan menjadi tulang punggung dalam peningkatan anggaran Polsri. Dalam pemenuhan sumber dana tersebut, Polsri tidak hanya mengandalkan dana dari Pemerintah dan masyarakat, tetapi juga secara sistematis mencari sumber pendanaan baru.

Kegiatan di bidang kerjasama dan pengembangan serta dengan didirikannya Pusat jasa Produksi yang meliputi seluruh jasa konsultasi, produksi dan analisis serta pelayanan publik lainnya diharapkan dapat menghasilkan pendanaan bagi Polsri secara sah, transparan dan akuntabel. Melalui kerjasama dapat memberikan banyak keuntungan bagi Polsri baik dari segi informasi perkembangan IPTEK sebagai landasan dalam penyempurnaan kurikulum, wahana pembelajaran bagi tenaga dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

## **BAB III**

### **ANALISIS KONDISI**

Analisis situasi menyeluruh diperlukan untuk mengetahui kondisi terkini Polsri baik dari bawah ke atas (*bottom up*) maupun dari atas ke bawah (*top down*). Kondisi situasi Polsri pada saat penyusunan Rencana Strategis ini meliputi berbagai bidang.

#### **3.1. Bidang Pendidikan dan Pembelajaran**

Menyambut era global Polsri harus mempersiapkan lulusan dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi industri. Polsri merupakan Pendidikan vokasi yang berperan sangat penting dalam peningkatan daya saing dan kualitas sumberdaya manusia era global. Beberapa tahun terakhir, muncul banyak perusahaan rintisan (*startup*) di Indonesia, dan jumlahnya adalah yang paling tinggi di kawasan ASEAN. Berdasarkan prediksi MarketPlus (2019), pertumbuhan perusahaan rintisan ini dapat mencapai antara 500% hingga 650% dalam dua tahun.

Menyambut kondisi lingkungan global, Polsri harus cepat menyesuaikan diri dengan memanfaatkan potensi yang telah dimiliki dan terus dikembangkan termasuk sumberdayanya. Era Industri 4.0 yang ditandai dengan tren automasi dan pertukaran data pada industri manufaktur harus diantisipasi dengan baik. Dalam hal ini, akan sangat diperlukan kompetensi dalam bidang *internet of things* (IoT), *cyber-physics*, *cloud computing*, dan *cognitive computing*. “Pabrik cerdas” merupakan ciri

Isu strategis yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi Polsri antara lain: tenaga kerja berpendidikan rendah masih mendominasi di Indonesia, lulusan pendidikan vokasi belum sesuai kebutuhan, pengembangan pendidikan vokasi belum sejalan kebutuhan dunia kerja, dan produktivitas tenaga kerja Indonesia dinilai masih rendah. Kondisi inilah membuat Kemendikbud menentukan penguatan yang focus kepada pendidikan tinggi vokasi dengan tujuan terjadinya ‘perkawinan’ antara dunia industry dan dunia kerja sehingga diperlukan melakukan reformasi penyelenggaraan pendidikan vokasi, meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi, memperkuat sistem sertifikasi kompetensi, dan memperkuat tata kelola pendidikan vokasi.

### 3.1.1 Bidang pendidikan

Sistem pembelajaran di Polsri dimulai dari Pendidikan dasar kedisiplinan bagi mahasiswa baru Program D III atau D IV, kegiatan dilaksanakan selama satu minggu di kampus Polsri bekerjasama dengan Kodam II Sriwijaya dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru. Kegiatan ini telah menjadi ciri khas di Polsri sejak awal pendiriannya dan tetap dipertahankan hingga saat ini karena dirasakan manfaatnya selain tanggapan positif dari pihak industri terhadap disiplin yang tinggi dari alumni.

Untuk menambah pemahaman mengenai peraturan pendidikan di Polsri, mahasiswa baru diberikan buku pedoman peraturan akademik dan tata tertib. Buku pedoman ini dievaluasi setiap empat tahun, dan diterbitkan setiap tahun akademik baru. Buku pedoman yang mendukung proses pembelajaran antara lain adalah peraturan akademik dan tata tertib mahasiswa, pedoman pembuatan silabus SAP dan AP, pedoman kerja praktek, pedoman pembuatan dan penilaian laporan akhir, pedoman ujian dan penilaian hasil belajar. Semua pedoman tersebut didistribusikan kepada seluruh staff dosen untuk dipedomani.

Khusus program D III jumlah SKS dalam kurikulum pendidikan di setiap program studi adalah 120 SKS dengan sistem paket semester dan dilaksanakan dalam 6 semester, terdiri atas mata kuliah teori dan praktek dengan perbandingan rata-rata 45 % teori dan 55 % praktek. Sementara untuk program D IV, jumlah SKS-nya adalah 140-144 dengan lama studi 8 semester dan perbandingan teori terhadap praktek sama seperti pada DIII.

Dalam kurikulum telah dirumuskan dengan jelas kompetensi utama dan kompetensi pendukung setiap program studi. Penerapan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) yang berbasis KKNI dituntut untuk selalu menyesuaikan kurikulum yang dimiliki dengan kebutuhan industri atau dunia kerja. Sebagai upaya pengembangan kurikulum diadakan berbagai kegiatan antara lain: *tracer study*, kunjungan industri dan *workshop* dengan mengundang pembicara dari industri, Asosiasi dan *stakeholder*.

Laboratorium dan bengkel yang dimiliki saat ini cukup menunjang proses pembelajaran, terutama dari sisi kuantitas, namun untuk mengejar perkembangan teknologi yang demikian pesat diperlukan beberapa pengembangan untuk kompetensi tertentu di setiap program studi. Pelaksanaan proses pembelajaran didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai seperti *Infocus*, *hotspot area*, alat bantu pengajaran berupa modul-modul kuliah teori dan praktek dan dilengkapi dengan ruangan kelas yang kondusif. Sebagian literatur tersedia buku-buku referensi di perpustakaan setiap program studi dan perpustakaanpusat.

Dalam mendukung kampus merdeka pengalaman di industri atau dunia kerja dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Kerja Praktek (magang) untuk mahasiswa semester 6 selama lebih kurang 2 bulan dan/atau kunjungan ke industri (KKL) untuk mahasiswa akhir semester 4 selama lebih kurang selama satu minggu.

### 3.1.2 Mahasiswa

Polsri telah memiliki 3 jenjang pendidikan yaitu diploma III, diploma IV, dan S2 yang masing-masing memiliki mahasiswa (student body) tahun 2019 adalah **6.355** dengan rincian mahasiswa D3 sebanyak **3.953** orang (62,20%), mahasiswa D4 sebanyak **2.376** orang (37,39%), dan mahasiswa S2 sebanyak **26** orang (0,41%).

Kemudian, total lulusan tahun 2019 jenjang diploma III sebanyak 1323 orang, diploma IV sebanyak 585 orang, dan jenjang S2 sebanyak 12 orang.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Permendiknas 34 Tahun 2010) menjelaskan bahwa pola penerimaan mahasiswa baru terbagi menjadi dua yaitu:

1. Pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional; dan
2. Pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri.

Pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional merupakan pola penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi melalui pola seleksi secara nasional yang dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi secara bersama untuk diikuti oleh calon mahasiswa seluruh Indonesia. Sedangkan pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri adalah pola penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan secara mandiri.

Politeknik Negeri Sriwijaya juga memakai dua macam jalur seleksi yaitu:

1. Jalur seleksi ujian tulis yang terbagi menjadi dua yaitu:
  - a. Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN) yang menggunakan pola penerimaan mahasiswa baru secara bersama oleh seluruh politeknik negeri di Indonesia ; dan
  - b. Ujian Masuk Mandiri Politeknik Negeri Sriwijaya (UMM POLSRI) yang menggunakan pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Sriwijaya.
2. Jalur seleksi undangan berdasarkan penjarangan prestasi akademik dan dan minat dari calon mahasiswa yang terbagi menjadi dua yaitu:
  - a. Penelusuran Minat dan Kemampuan – Politeknik Negeri (PMDK-PN) yang



menggunakan pola penerimaan mahasiswa baru secara bersama oleh seluruh politeknik negeri di Indonesia; dan

- b. Penelusuran Minat dan Prestasi – Politeknik Negeri Sriwijaya (PMP POLSRI) yang menggunakan pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Sriwijaya.

Polsri telah berupaya untuk meningkatkan tingkat keketatan penerimaan mahasiswa antara lain melalui promosi, brosur, penayangan di media cetak dan televisi, akan tetapi hasilnya belum maksimal. Dalam perjalanannya sampai tahun 2005, Polsri telah memiliki 11 Program Studi D III yaitu Teknik Sipil, Mesin, Kimia, Listrik, Telekomunikasi, Elektronika, dan Bahasa Inggris Pariwisata dan perhotelan dan 11 Program Studi D IV yaitu Akuntansi Sektor Publik, Manajemen Bisnis, Manajemen Informatika, Perencanaan Jalan dan Jembatan, Teknik Elektronika, Teknik Energi, Teknik Mesin Produksi dan Perawatan, Teknik Telekomunikasi, Teknologi Informatika Multimedia Digital, Teknologi Kimia Industri dan Usaha Perjalanan Wisata. Lulusan Polsri mempunyai sebutan Ahli Madya (A.Md) untuk program D III dan gelar Sarjana Terapan Sain Terapan (SST) untuk program D IV.

### 3.1.3 Dosen dan tenaga kependidikan

Saat ini Politeknik Negeri Sriwijaya memiliki Dosen Tetap sebanyak **377** orang, dengan sebaran memiliki tingkat pendidikan S-3 sebanyak **38 (10,08%)** orang, memiliki tingkat pendidikan S-2 sebanyak **339 (89,92%)** orang. Semua dosen Polsri tersebut telah memenuhi **Standar Dosen dan Tenaga kependidikan Polsri kode:06-STD/SPMI/Polsri** dan juga **Undang-undang No.19 Tahun 2005** tentang Guru dan Dosen yang mengamanatkan bahwa dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program magister (S2).

. Pembelajaran yang dilakukan dosen terhadap mahasiswa sebanyak **6355** orang. Berdasarkan **aspek kecukupan** dengan rasio dosen terhadap mahasiswa 1 : 17, maka tenaga dosen yang tersedia saat ini sudah **sangat mencukupi** untuk melayani mahasiswa baik pembelajaran di kelas maupun di bengkel (workshop) dan laboratorium. Untuk aspek **Kinerja dosen** dinilai dalam pelaksanaan bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian yang tertuang dalam rencana dan laporan Beban Kerja Dosen (BKD) tiap semester sebagai dosen yang bersertifikasi Pendidik Profesional dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai pegawai negeri sipil.

Sampai Desember 2019 tenaga akademik (dosen) Polsri yang berasal dari 22 Prodi untuk program D III dan 2 prodi untuk program D IV serta UP. MPK berjumlah 375 orang yang terbagi menjadi 360 orang dari prodi dan 15 orang dari UP MPK. (Tabel 12). Jumlah mahasiswa yang dilayani pada tahun ajaran 2018/2019 adalah sebanyak 5960 orang. Berdasarkan jumlah tersebut maka rasio dosen terhadap mahasiswa adalah 1 :16.

**Tabel 3.3 Komposisi Dosen/Instruktur Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Prodi / Unit	Jumlah seluruh (org)	Jenjang Pendidikan								Sedang Pendidikan	
		S0		S1		S2		S3		S2	S3
		jlh	%	Jlh	%	jlh	%	jlh	%		
<b>Teknik Sipil</b>	<b>41</b>	-	-	5	12,2	36	87,8	1	-		
<b>Teknik Mesin</b>	<b>40</b>	-	-	4	10	36	90	-	-	-	1
<b>Teknik Kimia</b>	<b>47</b>	-	-	2	4,3	40	85	7	10,64	-	2
<b>Teknik Elektronika</b>	<b>25</b>	-	-	-	-	23	100	2	-	-	3
<b>Teknik Listrik</b>	<b>25</b>	-	-	-	-	25	100	-	-	-	1
<b>Teknik Telekomunikasi</b>	<b>25</b>	-	-	1	4	23	92	1	4	1	1
<b>Teknik Komputer</b>	<b>23</b>	-	-	-	-	23	100	-	-	-	1
<b>Akuntansi</b>	<b>40</b>	-	-	2	5	38	95	6	-	2	5
<b>Administrasi Niaga</b>	<b>42</b>	-	-	-	-	39	92,3	3	7,7	-	5
<b>Manajemen Informatika</b>	<b>23</b>	-	-	1	4,3	22	95,7	-	-	1	1
<b>Bahasa Inggris</b>	<b>25</b>	-	-	2	8	22	88	1	4	1	4
<b>UP. MPK</b>	<b>19</b>	-	-	3	15,8	16	84,2	-	-	3	3
Jumlah keseluruhan	<b>375</b>	-	-	20	-	340	-	10	-	-	-
Persentase %	<b>100</b>		-		5,5		91,9		2,7	-	-
Jumlah yang sedang mengikuti pendidikan					<b>49</b>					<b>9</b>	<b>27</b>

Sumber : Data Kepegawaian Polsri, 2015

Ketersediaan tenaga dosen yang handal diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan dan memberikan kontribusi yang tinggi dalam peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **2. Tenaga Kependidikan**

Jumlah seluruh tenaga administrasi, teknisi dan pustakawan yang berstatus PNS pada saat ini berjumlah 195 orang dengan jenjang pendidikan : 13 orang ( %) berpendidikan magister, 71 orang (29 %) berpendidikan S1, 27 orang ( %) berpendidikan S0, 66 orang (%) berpendidikan SLTA, dan 14 orang (%) berpendidikan SD (Tabel 17.a). Jumlah mahasiswa yang dilayani pada tahun ajaran 2015/2016 adalah sebanyak 5820 orang. Berdasarkan jumlah tersebut maka rasio tenaga kependidikan terhadap mahasiswa adalah 1 :30.

Untuk mendukung sebuah institusi yang berkualitas maka sebaiknya tenaga kependidikan yang berkualifikasi SMU perlu ditingkatkan jenjang pendidikannya ke S1. Peningkatan pendidikan/keahlian khusus atau spesifik bagi tenaga non akademik terutama teknisi sangat diperlukan mengingat mereka merupakan pendamping dosen di laboratorium atau bengkel.

### **3.2 Kemahasiswaan dan Lulusan**

Polsri telah melakukan berbagai upaya untuk memfasilitasi kegiatan mahasiswa di dalam dan luar kampus. Kegiatan-kegiatan seperti program kreativitas mahasiswa, pemilihan mahasiswa berprestasi, dukungan pada kompetisi-kompetisi yang diikuti oleh mahasiswa, dukungan kegiatan himpunan dan organisasi kemahasiswaan, menyediakan pembina organisasi, pelatihan kewirausahaan, dan lain-lain. Layanan lain yang disediakan adalah beasiswa, layanan bagi mahasiswa program Bidikmisi, inkubator bisnis, komisi disiplin, dan bimbingan dan konseling.

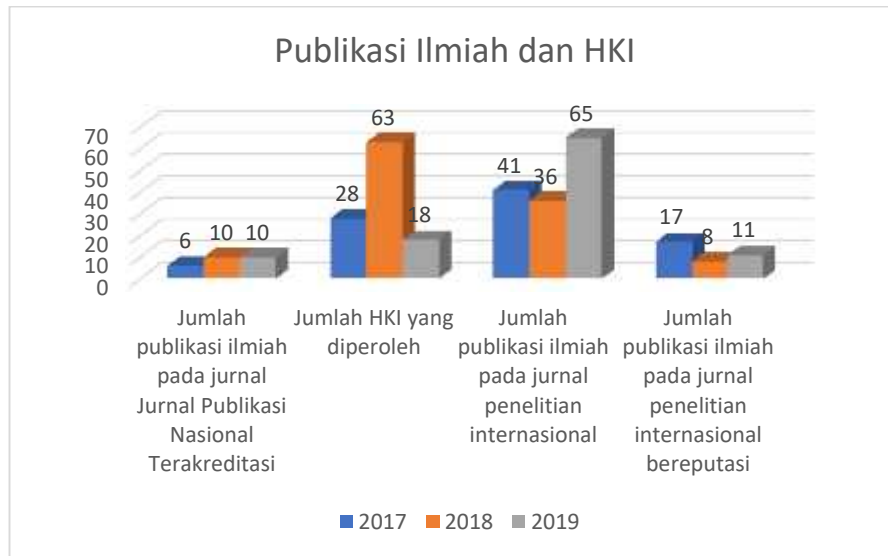
### **3.3 Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat**

Dalam upaya peningkatan mutu penelitian yang berkelanjutan, Politeknik Negeri Sriwijaya melaksanakan pengembangan penelitian berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur dan sistematis.

Statuta Polsri tahun 2011 juga mengatur keberadaan, tugas dan fungsi Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat (P3M) sebagai unsur pelaksana yang mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh para dosen, dan kegiatan penelitian lainnya, serta ikut mengusahakan dan mengendalikan sumber daya yang diperlukan.

Program pengembangan pusat pengabdian kepada masyarakat adalah un kegiatan sosialisasi, pelatihan, workshop/lokakarya serta menangani penerbitan jurnal dalam rangka meningkatkan semangat, kepercayaan diri dalam mengimbangi kompetensi dosen untuk penelitian dan pengabdian.

Publikasi ilmiah meliputi artikel yang dimuat di jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi dan jurnal nasional tidak terakreditasi (ber ISSN).



a) Jumlah Publikasi Ilmiah dan HKI



b) Jumlah Judul Penelitian dan Jumlah Dosen yang meneliti

Gambar 3.2 Indikator Kinerja Utama jumlah jurnal dan jumlah judul peneliti, 2019

Setiap jurusan yang ada di Polsri memiliki satu atau lebih kekuatan keilmuan yang bersesuaian dengan 8 fokus bidang penelitian unggulan Polsri yaitu : 1) Teknologi dan Manajemen Energi, 2) Teknologi dan Manajemen Pangan, 3) Teknologi Informasi dan Komunikasi, 4) Teknologi dan Manajemen Material Maju, 5)

Teknologi dan Manajemen Air, 6) Sosial Humaniora - Seni Budaya – Pendidikan, 7) Teknologi dan Manajemen Transportasi, 8) Teknologi dan Manajemen Penanggulangan Kebencanaan.

### 3.4 Sarana dan Prasarana

Saat ini Polsri telah memiliki beberapa gedung kuliah, gedung perkantoran, bengkel, laboratorium yang berkualitas baik. Sertai ruang kuliah yang nyaman dilengkapi dengan AC dan peralatan perkuliahan yang dibutuhkan. Polsri juga memiliki Fasilitas perpustakaan yang memadai di setiap jurusan selain perpustakaan utama yang berada digedung terpisah dengan jurusan. Pada tabel di bawah dapat dilihat detail kepemilikan Gedung, Ruang kuliah laboratorium yang dimiliki oleh Polsri.

#### 1. Prasarana Untuk Kegiatan Akademik dan Non-Akademik

Tabel 3.1 Prasarana untuk kegiatan akademik

No	Jenis Prasarana	Jumlah Unit	Total Luas (m <sup>2</sup> )	Kepemilikan*		Kondisi**	
				Milik Sendiri	Sewa/ Pinjam/ Kerjasama	Terawat	Tidak Terawat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Perkantoran/ administrasi	90	3,311	√		√	
2	Ruang kuliah	126	7,474	√		√	
3	Ruang diskusi, seminar, rapat	12	923	√		√	
4	Ruang kerja dosen	39	1,899	√		√	
5	Laboratorium/ studio/bengkel/dsb	143	10,835	√		√	

Tabel 3.2 Prasarana untuk kegiatan non-akademik

No.	Jenis Prasarana Pendukung	Jumlah Unit	Total Luas (m <sup>2</sup> )	Kepemilikan*		Kondisi**	
				Milik Sendiri	Sewa/ Pinjam/ Kerjasama	Terawat	Tidak Terawat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Lapangan Olah Raga - Basket dan Futsal	2		√		√	

No.	Jenis Prasarana Pendukung	Jumlah Unit	Total Luas (m <sup>2</sup> )	Kepemilikan*		Kondisi**	
				Milik Sendiri	Sewa/ Pinjam/ Kerjasama	Terawat	Tidak Terawat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	- Bola Volly - Tenis lapangan Gedung bulu tangkis		4595				
2	Kegiatan Mahasiswa (HMJ, UKM, Bahtera Buana, BEM, dan MPM)	47	977	√		√	

2. Fasilitas Komputer dan Pendukung Pembelajaran dan Penelitian.

Fasilitas komputer dengan softwear terbaru dimiliki oleh hampir disetiap laboratorium prodi untuk memperlancar pelaksanaan pembelajaran secara keseluruhan.

3. Kesesuaian dan Kecukupan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dan cukup dengan kebutuhan setiap jurusan dalam rangka mendukung proses pembelajaran sudah cukup memadai. Sehingga Polsri dapat mewujudkan pencapaian visinya, yaitu menjadi lembaga vokasi yang unggul.

4. Rancangan Pengembangan Sistem Informasi

Untuk sistem informasi, Polsri sudah memiliki akses internet gratis dengan ketersediaan WIFI di lingkungan Kampus Polsri. Polsri memiliki kekuatan akses internet sebesar 100 Mbps.

Ketersediaan WIFI ini sangat membantu dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Rancangan pengembangan Sistem Informasi Polsri terus dilakukan dan saat ini telah menghasilkan SIM untuk kegiatan Akademik (SISFO) yang membantu dalam ketersediaan modul penerimaan mahasiswa baru online, modul daftar ulang registrasi, modul kegiatan akademik. SIM Beasiswa, SIM Alumni dan Karir, SIM Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, SIM Pusat Penjaminan Mutu Internalserta SIM Keuangan.

5. Kecukupan dan Kesesuaian Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Pemberdayaan Sistem Informasi

Berkaitan dengan daya dukung infrastruktur jaringan komputer, memberikan

jaminan koneksi dan akses terhadap data dan informasi baik akademik, keuangan dan juga kepegawaian. Meskipun jaringan ini belum ideal namun dirasakan cukup memadai dalam memberikan layanan koneksi dan akses informasi.

Untuk proses pembelajaran dalam bentuk *e-learning* yang di beri nama LMS (*Learning Management System*) Polsri. Aplikasi ini dikembangkan oleh Divisi Komputer Polsri dengan menggunakan aplikasi berbasis web CMS (moodle) yang bersifat *open source*. Sedangkan mahasiswa dapat mengakses program ini melalui laman <http://www.lms.polsri.ac.id> dengan cara login menggunakan username dan password yang dibagikan ke masing-masing mahasiswa.

Sarana prasarana adalah fasilitas fisik yang meliputi infrastruktur, gedung, Kelas, Laboratorium, dan Fasilitas pendukung lainnya. Kampus Polsri yang terletak di belakang kampus UNSRI Bukit besar sesungguhnya memiliki lahan yang cukup luas dan kampus representatif. Tetapi karena tidak berada di pinggir jalan maka masih ada masyarakat umum yang belum tahu posisi Polsri.

Oleh sebab itu dalam lima tahun ke depan Polsri perlu mengupayakan jalan keluar-masuk alternatif, dan pengembangan kampus pada lahan baru.

Tabel 3.4. Data Perincian Gedung dan Prasarana Lainnya Rekapitulasi - Keadaan

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA		DATA PERINCIAN GEDUNG POLITEKNIK MENURUT UNIT/JURUSAN KEADAAN PER DESEMBER 2015						TABEL	
Disahkan Oleh :									
Tanggal :									
NO	NAMA GEDUNG	LUAS PERSIL (M2)	LUAS BANGUNAN (M2)	LUAS LANTAI (M2)	JUMLAH LANTAI	KODE GEDUNG	TINGGI GEDUNG	TAHUN DIBANGUN	TAHUN DIGUNAKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. BANGUNAN FISIK</b>									
1	Kantor Pusat Administrasi	2,208	1,882	5,228	3	KPA	19	1985	1986
2	Kuliah 1	1,189	984	2,951	3	GK_1	19	1982/2012	1982/2013
3	Kuliah 2	1,189	996	2,965	3	GK_2	19	1982/2012	1982/2013
4	Kuliah 3	1,177	998	2,946	3	GK_3	19	1985	1985
5	Kuliah 4	1,188	996	2,964	3	GK_4	19	1985	1986
6	Kuliah 5	1,254	895	2,685	3	GK_5	19	1997 / 2000	2000
7	Kuliah 6	1,254	974	2,843	3	GK_6	19	2006	2006
8	Gedung Pendidikan	1,536	1,200	6,000	5	GP	27,5	2010	2011
9	Lab / Bengkel Teknik Elektro (TEE)	1,375	1,114	3,341	3	TEE	15	1985	1986
10	Laboratorium Teknik Elektro	144	100	100	1	LTE	5	2010	2010
11	Bengkel Teknik Sipil	1,402	1,130	1,130	1	BS	7,5	1982	1982
12	Laboratorium Teknik Sipil	1,000	900	900	1	LS	7,5	1982	1982
13	Bengkel Teknik Sipil Terbuka	1,000	926	926	1	BT	7,5	1985	1985
14	Perengkapan Teknik Mesin	878	525	525	1	PM	5,5	1982	1982
15	Laboratorium Teknik Mesin	1,449	1,212	1,212	1	LM	7,5	1982	1982
16	Bengkel Teknik Mesin	1,794	1,500	1,500	1	BM	7,5	1982	1982
17	Perawatan & Perbaikan Mesin (MR)	406	250	250	1	PP	5,5	1994	1994
18	Laboratorium Teknik Kimia	1,350	1,052	1,934	2	LK	9	1985 / 1989	1985 / 1989
19	Laboratorium Satuan Operasi	220	458	458	1	LSO	4,5	2009	2009
20	Laboratorium Proses Pupuk	96	60	60	1	LPP	5	2012	2013
21	Toilet Umum	193	125	125	1	TU	3,5	1982/2009	1982/2009
22	Fasilitas Umum	2,030	1,312	1,312	1	FU	8,6	1982 / 85/12	1982 / 85/13
23	Gedung Parkir kendaraan	1,110	685	1,292	2	PK	12	2012	2013
24	Gedung Kirumahntagaan	57	22	22	1	RT	4,2	2012	2013
25	Masjid Kampus	1,365	324	324	1	MK	9	2005	2006
26	Pusat Kegiatan Kewirausahaan Mhs	108	42	42	1	PKM	3,5	2003	2012
27	Sekretariat Rohis	60	20	41	2	PKM	5,5	2001	2001
28	Guest House	419	243	243	1	GH	5,5	2006	2006
29	Gedung Koordinator Kegiatan Mahasiswa	70	58	58	1	PKM	5,5	2004	2004
30	Kegiatan Mahasiswa BEM	880	224	224	1	PKM	9	1997 / 2000	2000
31	Kegiatan Mahasiswa Bahtera Buana	240	36	36	1	PKM	5,5	2005	2005
32	Pos penjagaan	200	42	42	1	PK	5,5	2005	2005
33	Pos Satpam 1 (area jalan masuk kampus)	30	12	12	1	PK	5,5	1993	1993
34	Pos Satpam 2 (area lapangan olah raga)	16	4	4	1	PK	3,5	2006	2006
35	Pos Satpam 3 (area jalan alternatif I)	16	4	4	1	PK	3,5	2006	2006
36	Pos Satpam 4 Lapangan Upacara	36	16	16	1	PK	4	2008	2009
37	Pos Satpam 5 samping GK_1	36	16	16	1	PK	4	2008	2008
38	Gardu Listrik PLN	48	20	20	1	GL	3,5	1982	1982
39	Menara Air 1	50	7	7	-	MA	15	1982	1982
40	Menara Air 2	50	7	7	-	MA	19	1985	1986
41	Kolam Reservoir	364	250	250	-	KR	-	1982	1982
42	Selasar	2,347	2,295	2,295	-	SR	4	82/85/10/12	82/85/10/13
43	Lapangan Olah Raga	4,095	3,928	3,928	-	LO	-	1990	1990
44	Gedung Olah Raga	500	188	188	1	GO	8,52	2002/2003	2003
45	Lapangan Upacara	1,800	1,800	1,800	-	LU	-	2000	2000
46	Pool Kendaraan Dinas	115	76	76	1	PKD	5,3	2006	2006
47	Lapangan Parkir Kendaraan Roda 2	249	152	152	-	LP2	-	1982/2010	1982/2010
48	Lapangan Parkir Kendaraan Roda 4	1,036	1,036	1,036	-	LP4	-	1997	1997
49	Jalan Aspal dan Halaman	7,414	7,414	7,414	-	JA	-	82/85/97	82/85/97
50	Trotoar	186	186	186	-	TR	-	1997	1998



NO	NAMA GEDUNG	LUAS PERSIL (M2)	LUAS BANGUNAN (M2)	LUAS LANTAI (M2)	JUMLAH LANTAI	KODE GEDUNG	TINGGI GEDUNG	TAHUN DIBANGUN	TAHUN DIGUNAKAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
51	Jalan Beton Alternatif 1	308	308	308	-	JBA	-	2006	2006	
52	Jalan Beton Alternatif 2	345	345	345	-	JBA	-	2011	2011	
	Jumlah I	47,881	39,348	62,741	63					
<b>II. PRASARANA LAINNYA</b>										
53	Kanstin Jalan	M <sup>3</sup>	1,717	1,717	1,717	-	KJ	-	82/85/11	82/85/11
54	Pagar Beton	M <sup>3</sup>	1,305	1,305	1,305	-	PB	-	82/85/97/99	82/85/97/99
55	Pagar Trali	M <sup>3</sup>	82	82	82	-	PT	-	1997 / 1999	1996 / 1999
56	Saluran Air	M <sup>3</sup>	4,509	4,509	4,509	-	SA	-	82/85/97	82/85/97
57	Taman / tata hijau kampus	M <sup>2</sup>	12,810	13,566	13,566	-	TM	-	1982 / 2012	1982/ 2012
	Jumlah	M <sup>3</sup>	7,613	7,613	7,613	-	-	-	82 / 2012	82 / 2015
		M <sup>2</sup>	16,160	-	-	-	-	-	82 / 2012	82 / 2015
<b>II. PRASARANA LAINNYA</b>										
1	Tanah Kampus I		71,654	-	-	-	TK.1	-	1982-2004	1982-2004
2	Tanah Kampus II		6,838	-	-	-	TK.2	-	2013	2014
3	Tanah Perumahan Dinas		30,904	-	-	-	TP	-	1982	1982
4	Tanah Guest House		403	-	-	-	TG	-	2006	2006
	Jumlah I		109,799	-	-	-			1982-2013	1982-2015

Sumber: Bagian Administrasi Umum Polsri 2019

Secara umum situasi sarana dan prasarana semakin baik dan dapat digunakan sesuai fungsinya masing-masing. Sampai tahun 2015 semua kelas sudah dilengkapi dengan AC, proyektor, screen, dan tirai lipat yang representatif. Setiap dosen diberi fasilitas lap top untuk proses pembelajaran. Alat-alat laboratorium terus diadakan/diperbaiki walaupun sifatnya bertahap. Pemeliharaan gedung dan laboratorium juga dilakukan secara bertahap sesuai prioritas yang mendesak. Penyediaan alat bantu pengajaran berbasis multimedia semakin diperbanyak dari tahun ke tahun. Pembangunan gedung Graha pendidikan 5 lantai tahun 2010 dimaksudkan untuk memfasilitasi kebutuhan ruangan bagi aula serba guna, perpustakaan, gedung kuliah, ICT dan kegiatan penunjang pendidikan lainnya

Rencana strategis 2020-2024 akan sarana prasarana, antara lain diuraikan di bawah ini :

- Sarana prasarana mesin/peralatan praktikum sudah banyak yang berumur lebih dari 34 tahun sehingga banyak yang rusak dan/atau kinerja menurun serta modelnya ketinggalan. Oleh sebab itu perlu dilakukan **program revitalisasi** alat-alat laboratorium/bengkel.
- Sarana gedung kuliah dan laboratorium, gedung pelayanan umum lainnya perlu dikembangkan lagi seiring dengan perkembangan program studi baik D III, D IV dan Program Magister terapan serta kelas-kelas kerjasama.
- Sarana dan prasarana umum seperti penyediaan air bersih, toilet, kantin, dan parkir

perlu ditingkatkan. Penyediaan air bersih hendaknya tidak tergantung dengan PDAM saja tetapi juga dengan memperbanyak sumur bor dan unit pengolahan air bersih. Peningkatan sarana penunjang proses pekerjaan dan pembelajaran di setiap ruangan seperti pemasangan AC perlu terus dilanjutkan.

### 3.5. Kelembagaan

Berdasarkan capaian Kinerja Polsri 2019 (Lakip 2019), dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya polsri menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi, kemudian dituangkan dalam perjanjian kerja antara Kementerian dengan Polsri, sesuai dengan sasaran strategis dengan indikator kerjanya yang telah ditetapkan, sebagai alat untuk mengukur ketercapainnya.

Polsri telah menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam periode 2019 yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi
2. Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan dikti
3. Meningkatnya relevansi kualitas dan kuantitas sumber daya iptek dan dikti
4. Terwujudnya tata kelola yang baik serta kualitas layanan dan dukungan yang tinggi
5. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan

Hasil pengukuran kinerja tahun 2019 seperti terlihat pada Tabel.

Tabel 3.6 Tabel hasil pengukuran kinerja tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	2019		
		Target	Capaian	satuan
1 Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dan Mahasiswa Pendidikan Tinggi	15 Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha	15	40	Mhs
	48 Jumlah Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi	48	64	Org
	19 Jumlah Prodi Terakreditasi Minimal B	19	15	Prodi
	441 Jumlah Lulusan yang Langsung Bekerja Sesuai Bidanganya	441	450	Org
	30 Jumlah Mahasiswa Berprestasi	30	56	Mhs
	18:1 Rasio Jumlah Calon Mahasiswa Terhadap Daya Tampung	18:1	18:1	Mhs

2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti	2 B 9	Ranking PT Nasional (Tingkat Politeknik) Akreditasi Institusi Jumlah Program Studi Binaan	2 B 9	12 B 9	Ranking Status Prodi
3	Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti	42	Jumlah Dosen Berkualifikasi S3	42	40	Org
		340	Jumlah Dosen Bersertifikat Pendidik	340	336	Org
		159	Jumlah Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala	159	165	Org
		8 1	Jumlah Kerjasama (MoU) yang ditindaklanjuti Jumlah Kerjasama Laboratorium Tersertifikasi	8 1	10 0	MoU Lab
4	Terwujudnya tata kelola yang baik serta kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	0,75	Indeks kepuasan pelayanan Tingkat kesesuaian kompetensi Pejabat	0,75	0,75	
5	Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan	20	Jumlah Publikasi Internasional	20	92	Judul
		19	Jumlah HKI yang didaftarkan	19	12	HKI
		35	Jumlah Sitasi Karya Ilmiah	35	477	Judul
		2	Jumlah Prototipe Industri	2	28	Prototipe
		30	Jumlah Prototipe R&D	30	18	Prototipe

### 3.6. Koordinasi dan Tata Kelola

#### 3.6.1. Koordinasi Perencanaan Pembelajaran

Kegiatan koordinasi penyusunan perencanaan pembelajaran dilakukan melalui koordinasi dengan unit-unit di lingkungan Polsri, rapat kerja perencanaan Polsri. Pihak yang terlibat rapat koordinasi perencanaan pembelajaran meliputi Direktur, para pembantu direktur dan ketua UPPM, ketua P2AI, para ketua jurusan, para ketua program studi dan para pejabat struktural di lingkungan Polsri.

#### 3.6.2. Tata Kelola

Implementasi Rencana Strategis Polsri memerlukan sistem tata kelola yang sinergis dan terintegrasi dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang no 12 tahun 12

tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Perundangan terkait. Selain itu, diperlukan penataan tugas dan tanggung jawab masing-masing Pembantu Direktur dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran strategis pembangunan pendidik dan tenaga kependidikan

Dalam menjalankan sistem tata kelola yang baik, diperlukan pola *good governance*. *Good governance* terdiri atas 7 (tujuh) karakteristik yaitu akuntabel; transparan; taat aturan; responsif, setara dan inklusif; efektif dan efisien; dan partisipatif.

Akuntabilitas merupakan kebutuhan dasar dari *good governance*. Direktur Polsri sebagai pimpinan perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan, dan menjawab berbagai pertanyaan terkait konsekuensi sebuah ketetapan yang terkait dengan masyarakat khususnya pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu, *good governance* harus memiliki karakteristik transparan. Masyarakat harus dapat mengikuti dan mengerti proses penetapan keputusan, sehingga masyarakat dapat melihat dengan jelas mengapa suatu keputusan dibuat serta informasi, saran, dan konsultasi apa saja yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan tersebut.

*Good governance* juga harus taat aturan, sehingga keputusan yang diambil konsisten dengan aturan perundangan yang relevan. Polsri sebagai perguruan tinggi juga harus dapat melayani kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan secara seimbang antara berbagai kepentingan secara tepat waktu dengan sikap yang sopan, dan responsif. *Good governance* juga tercermin ketika semua pendidik dan tenaga kependidikan merasakan bahwa kepentingannya telah dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

*Good governance* juga harus efektif dan efisien. Dalam menjalankan tata kelola, Polsri harus mampu memanfaatkan sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan waktu yang ada dengan efektif dan efisien. Setiap orang yang terkait dan/ atau tertarik harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Cara ini dapat dilakukan melalui penyampaian informasi, permintaan opini, pemberian kesempatan untuk menyampaikan rekomendasi, ataupun terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan.

Pelaksanaan tata kelola berbasis *good governance* dapat menjadi ukuran akuntabilitas kinerja pelayanan perguruan tinggi yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh satuan pengawas internal.

### **3.7. Pengendalian dan Evaluasi**

Tahap pengendalian dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan rencana pembelajaran sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam Renstra Polsri Ruang lingkup pengendalian mencakup realisasi pelaksanaan program pembelajaran dan identifikasi permasalahan dan kendala pembelajaranserta langkah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Polsri.

Sementara itu, evaluasi dimaksudkan untuk dapat mengetahui dengan pasti capaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dalam rangka perbaikan pelaksanaan rencana pembelajaran di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan pada keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impact*) dari pelaksanaan rencana pembelajaran.

Proses pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Polsri merupakan upaya bersama antar unit. Hal ini dilakukan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi proses pembelajarannya.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Polsri dilakukan di bawah koordinasi Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawasan Internal. Pengendalian pada masing-masing unit dilakukan oleh unit kerja masing-masing yang menyelenggarakan fungsi pembelajaran dengan bekerjasama dengan Satuan Penjaminan Mutu pada level level masing-masing unit dan bagian.

### **3.8. Isu Straegis Pendidikan Tinggi 2020-2024**

#### **a) Mutu dan Relevansi**

- Mutu lulusan pendidikan tinggi yang belum mengembirakan
- Relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri
- Kualitas dan kompetensi dosen
- Budaya politik dan publikasi ilmiah

#### **b) Akses dan Keterjangkauan**

- APK pendidikan tinggi masih 30%
- Akses orang miskin terhadap pendidikan tinggi

#### **c) Tatakelola Perguruan Tinggi**

- Good University governance
- Disparitas mutu antar perguruan tinggi
- Kepatuhan Perguruan Tinggi terhadap ketentuan yang berlaku
- Otonomi dan akuntabilitas publik

**d) Terwujudnya Kampus Merdeka**

**3.9. Analisis Kondisi Internal dan Eksternal(SWOT-Analysis)**

**3.9.1 Kondisi Internal**

**A. KEKUATAN**

- 1) SDM relatif muda dan punya kualifikasi pendidikan, keahlian dan pengalaman yang baik
- 2) Jumlah Alumni yang besar yang sudah memiliki jabatan diberbagai posisi dan adanya jejaring alumni
- 3) Staf Dosen yang berpendidikan S2,S3 dan memiliki sertifikat profesionalmeningkat.
- 4) Telah mendapatkan ISO9001:2008
- 5) Semua Program Studi sudahterakreditasi
- 6) Dosen dan mahasiswa sudah terbiasa kerjasama dalam penelitian/pengabdian
- 7) Sebagian besar dosen sudah terbiasa melakukan penelitian danadipa/PNBP
- 8) Sebagian besar dosen berada pada usiaproduktif
- 9) Sosialisasi peluang penelitian/pangabdian secara *hard copy* dan *soft copy* (melalui internet)
- 10) Pelatihan terkait penelitian/pengabdian dilakukan secara terjadual minimal satu kali setahun
- 11) Polstri termasuk dalam klaster madya dalam kinerja penelitian sehingga mempunyai reviewer sendiri dalam penilaian proposal penelitian skimdesentralisasi
- 12) Beberapa dosen sudah menjadi asesor BAN PT dan asesorkeahlian
- 13) Pengalaman kerjasama dengan stakeholder
- 14) Pembina Politeknik dan Pendidikan Diluar Domisili yang baru didirikan
- 15) Fasilitas belajar dan laboratorium memadai
- 16) *Free hot spot area*
- 17) Ada perpustakaan pusat dan pada se tiaprodi
- 18) Pengalaman mendapat hibahkompetisi

- 19) Lokasi strategis, aman, gedung representatif
- 20) Struktur organisasi mampu menghadapi tantangan masa depan
- 21) Tinjauan kurikulum dilakukan secara periodik 2-4 tahun sesuai dengan ketentuan BAN-PT
- 22) Memiliki Beberapa kelaskerjasama

## **B. KELEMAHAN**

- a) Metodologi pembelajaran belum optimal
- b) Kelompok bidang Keahlian belum efektif.
- c) Laboratorium/bengkel belum seluruhnya terakreditasi
- d) Implementasi sistem penjaminan mutu internal belum optimal
- e) Peranserta dosen dalam Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat belum optimal
- f) Promosi/sosialisasi hasil penelitian terapan masih belum optimal
- g) Peralatan laboratorium dan bengkel rusak dan perlu peremajaan
- h) Staf Dosen dan Administrasi sudah mendekati masa pensiun
- i) Ketersediaan lahan yang masih terbatas
- j) Sistem informasi manajemen penelitian/pengabdian belum ada
- k) Struktur organisasi P3M masih kecil

### **3.9.2 Kondisi Eksternal**

#### **A. PELUANG**

- 1) Peminat cukup tinggi
- 2) Berlakunya MEA
- 3) Sum-Sel sebagai tuan rumah ASIAN Games 2018
- 4) Kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan
- 5) Peluang kerjasama dengan stake holder tinggi
- 6) Dana hibah penelitian baik dari Kemristek Dikti maupun Kementerian/Lembaga tersedia banyak
- 7) Banyak industri di Sumsel yang mempunyai dana CSR dan punya masalah untuk diselesaikan bersama
- 8) Banyak tersedia sumber daya alam di Sumsel yang dapat diteliti

- 9) Kerja sama penelitian/pengabdian antar perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri
- 10) Akreditasi jurnal cetak dan e-journal
- 11) Tersedia dana insentif dari Kemristek Dikti bagi penulisan jurnal terakreditasi dan jurnal internasional.
- 12) Beasiswa yang ditawarkan pemerintah daerah/pusat beserta swasta tinggi
- 13) Kesempatan kerja bagi para alumni luas
- 14) Kebijakan Pemerintah terhadap pendirian pendidikan vokasi dan Pendidikan Duluar Domisili baru.
- 15) Komitmen Pemerintah provinsi terhadap pengembangan pendidikan tinggi
- 16) Jumlah dan potensi alumni sebagai jejaring Polstri (beasiswa, peluang kerja alumni baru, kolaborasi PPM, investasi);
- 17) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan industri

## **B. ANCAMAN**

- 1) Globalisasi dan penetrasi Perguruan tinggi lain ke Sumsel
- 2) Reputasi PTN dan PTS lain meningkat
- 3) Adanya lembaga pendidikan tinggi dengan program sejenis.
- 4) Makin meningkatnya syarat kualifikasi keahlian untuk bekerja di berbagai sektor
- 5) Memasuki era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), arus tenaga kerja asing akan masuk ke Indonesia
- 6) Administrasi pelaporan penelitian/pengabdian terutama masalah keuangan dan pajak semakin ketat
- 7) Kinerja penelitian/pengabdian akan dinilai setiap tahun
- 8) Nilai standar 7 pada borang akreditasi institusi dan prodi sangat signifikan sehingga mempengaruhi penilaian akreditasi
- 9) Dana penelitian/pengabdian dan dana pelatihan/workshop yang terkait masih kecil.

bekerjasama dengan Satuan Penjaminan Mutu pada level masing-masing





## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1 Kebijakan Umum

Renstra Politeknik Negeri Sriwijaya Tahun 2020 -2024 merupakan implementasi dari Rencana Induk Pengembangan Politeknik Negeri Sriwijaya 2011-2035 yaitu berada pada phase ke III Penguatan output dan outcome. Renstra Polsri 2020-2024 Mempunyai 4 sasaran utama , 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud, 3 IKU Satker dan 30 Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

#### 4.2 Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja 2020-2024

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET					
				2019 (Based)	2020	2021	2022	2023	2024
PI	<b>Meningkatkan Kualitas Lulusan Politeknik Negeri Sriwijaya</b>	Persentase Lulusan D4/D3/D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi,, atau menjadi wiraswasta	%	40	50	55	57	60	70
		Persentase Lulusan D4,D3,D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (Dua puluh SKS diluar kampus atau memperoleh prestasi paling rendah ditingkat nasional	%	8	10	10	30	40	50
		Persentase jumlah lulusan dengan IPK 3.00	%	96	96	97	98	99	99
		Persentase lulusan mendapat pekerjaan pertama kali dengan waktu tunggu 6 bulan	%	70	72	75	78	80	82
		Persentase lulusan yang bekerja sesuai bidangnya	%	70	72	74	75	77	80
		Persentase lulusan dengan nilai TOEIC 450	%	35	37	40	42	45	50
		Persentase lulusan yang memilii sertifikat kompetensi dan profesi	%	30	35	40	50	60	70

		Persentase jumlah mahasiswa asing/berasal dari luar propinsi Sum-Sel terhadap jumlah seluruh mahasiswa	%	1	1	2	2	2	2
		Persentase mahasiswa penerima beasiswa	%	12	15	17	20	23	25
		Jumlah mahasiswa berprestasi akademik internasional	orang	3	3	3	5	7	10
		Jumlah mahasiswa berprestasi non akademik internasional	orang	1	2	2	3	4	5
		Jumlah proposal kreativitas dan inovasi mahasiswa yang diterima * Program Kreativitas Mahasiswa * Program Mahasiswa Wirausaha	%	5	7	10	12	14	17
II	<b>Meningkatnya Kualitas Dosen Politeknik Negeri Sriwijaya</b>	Persentase dosen tetap yang berkualifikasi S3 , memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui dunia industri dan dunia kerja, atau dari kalangan praktisi profesional, dunia industri atau dunia kerja	%	5	10	15	17	20	23
		Jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat recognisi internasional atau yang diterapkan dimasyarakat per jumlah dosen .	Hasil penelitian per jumlah dosen	0,1	0,1	0,10	5	7	10
		Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain , di QS 100 berdasarkan bidang ilmu , bekerja sebagai praktisi di dunia industri , atau membina mahasiswa yang berhasil mendapatkan prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	10	15	30	32	34	36
		Jumlah dosen per tahun yang memperoleh HKI	Orang	15	20	25	30	35	40
		Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal penelitian internasional	judul	30	35	40	45	50	55
		Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal penelitian internasional bereputasi	judul	10	12	15	17	19	21

		Persentase proposal penelitian dosen yang diterima /didanai	%	25	27	29	30	32	35
		Persentase proposal pengabdian kepada masyarakat yang diterima/didamai	%	25	30	33	35	37	40
		Jumlah akumulasi, paten Sederhana	buah	1	3	5	7	9	12
		Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dipakai oleh industri	buah	3	3	5	7	9	10
		Jumlah Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>	judul	2	5	10	15	20	30
		Persentase dosen berkualifikasi pendidikan S3	%	10	12	15	17	20	25
		Persentase Dosen yang memiliki Sertifikasi Pendidik	%	84	85	87	90	92	95
		Persentase Dosen yang memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala	%	48	50	52	55	58	60
		Jumlah dosen polsri yang berasal dari industri	orang	23	30	35	40	45	50
III	<b>Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran</b>	Persentase program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	25	30	35	40	50	55
		Persentase mata kuliah D4/D3/D2 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra	%	20	30	35	40	45	50
		Persentase program studi D4,D3 dan D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	%	1	1	2	3	4	5
		Persentase Prodi yang mendapat sertifikasi A	%	20	25	30	35	40	50
		Jumlah laboratorium yang mendapat sertifikasi ISO	Laboratorium	1	1	2	3	4	5
		Jumlah kerjasama Polsri ditingkat nasional	kerjasama	30	35	40	45	50	60
		Jumlah kerjasama Polsri ditingkat Internasional	kerjasama	3	5	7	10	12	15
		Jumlah kumulatif penambahan prodi baru	prodi	2	3	5	7	8	10
		Persentase dosen yang telah mendapatkan metodologi pembelajaran	%	90	92	94	96	97	98

		Persentase dosen yang telah melakukan metode pembelajaran SCL dengan memanfaatkan <i>e-learning</i> polsri	%	30	80	82	85	87	90
		Jumlah Buku Ajar ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>	judul	2	5	10	15	20	30
		Jumlah bahan ajar yang diadop dari hasil penelitian dosen	Judul	3	5	7	9	12	15
IV	<b>Meningkatnya tata kelola satuan kerja Politeknik Negeri Sriwijaya</b>	Rata-Rata predikat Sakip minimal BB	BB	BB	BB	BB	AA	AA	AA
		Rata-rata kinerja anggaran atas pelaksanaan RK-A/L minimal 93	%	91	93	93,5	94	94,5	95
		Persentase standar mutu polsri yang telah dilakukan evaluasi pertahun	%	30	35	40	60	80	90

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis 2020-2024 Politeknik Negeri Sriwijaya disusun agar menjadi acuan dasar program yang sedang dan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang. Untuk pelaksanaan jangka pendek harus dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) oleh setiap Jurusan/bagian/sub bagian dan pada akhir setiap pelaksanaan program jangka pendek dibuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sehingga dapat dievaluasi tingkat keberhasilan pada setiap program.

Melalui pelaksanaan pada setiap indikator renstra diharapkan dapat menca[ai visi, misi , dan tujuan Politeknik Negeri Sriwijaya. Dalam keadaan terjadi perubahan lingkungan strategis diluar prediksi sehingga Rencana Strategis menghadapi kendala dalam mencapai indikator kinerjanya, maka dapat dilakukan perubahan atas inisiatif pimpinan polsri yang diajukan kepada Senat Polsri untuk mendapatkan persetujuan.